

Judul : Penghasilan Anggota DPR tembus Rp 230 juta per bulan
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

Penghasilan Anggota DPR Tembus Rp 230 Juta Per Bulan

Dengan penghasilan anggota Dewan Rp 230 juta setiap bulan, selama 2025 negara harus mengeluarkan Rp 1,6 triliun untuk 580 anggota DPR. Penghasilan Rp 230 juta ini belum termasuk rencana tambahan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi tiap anggota DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat ini ditaksir mencapai Rp 230 juta per bulan. Ini belum termasuk penambahan tunjangan perumahan yang besarnya Rp 50 juta setiap bulan untuk setiap anggota DPR. Penghasilan anggota DPR ini sekitar 35,4 kali lipat pendapatan per kapita warga Indonesia yang besarnya Rp 6,5 juta per bulan.

Besarnya penghasilan yang diterima anggota DPR itu didapat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dari hasil pengolahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2025-2026. Penghasilan Rp 230 juta per bulan itu terdiri dari gaji dan berbagai tunjangan.

Jika ditotal, penghasilan satu anggota DPR mencapai Rp 2,8 miliar per tahun. Dengan demikian, negara harus mengalokasikan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun selama 2025 untuk membayar 580 anggota DPR.

Nilai yang dikeluarkan negara untuk gaji dan tunjangan DPR ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, misalnya, anggaran gaji dan tunjangan DPR sebanyak Rp 1,2 triliun, kemudian pada 2024 sebanyak Rp 1,18 triliun.

Penghasilan anggota DPR itu bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita warga Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, produk domestik bruto (PDB) per kapita Rp 78,6 juta atau 4.960,3 dollar AS. Hal itu berarti, pendapatan per kapita warga Indonesia sekitar Rp 6,5 juta per bulan, kurang dari 4 persen penghasilan anggota DPR per bulan saat ini.

Bahkan, jika dibandingkan dengan upah minimum Jakarta Rp 5,39 juta per bulan, penghasilan yang diterima anggota DPR mencapai 42 kali lipat. Jika dibandingkan dengan upah pekerja di Ban-

Gaji dan Tunjangan Anggota DPR



Keterangan: Jika dirata-rata, pada 2025 setiap anggota DPR berpotensi menerima sekitar Rp 2,8 miliar per tahun atau lebih dari Rp 230 juta per bulan.

Sumber: Data DPR 2023-2025, data BPS 2024

INFOGRAFIK: KOMPAS.ID

janegara, Jawa Tengah, upah terendah di Indonesia, sebesar Rp 2,17 juta per bulan, penghasilan anggota DPR mencapai 105 kali lipat.

"Gaji dan tunjangan anggota DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat," kata peneliti Fitra, Bernard Allvitro, saat media briefing bertajuk "Anggaran

(Bersambung ke hlm. 15 kol 1-4)

>> BACA JUGA:

Setara Gaji 36.000 Guru

Negara harus siapkan anggaran hingga Rp 1,74 triliun untuk tunjangan perumahan 580 anggota DPR selama lima tahun.

KOMPAS.ID

kompas.com/tunjangandpr

Penghasilan Anggota DPR Tembus Rp 230 Juta Per Bulan

(Sambungan dari halaman 1)

DPR RI: Antara Fungsi Konstitusionalitas dan Kemewahan Personal", di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Hentikan tambahan

Oleh karena itu, menurut dia, DPR harus menghentikan penambahan tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR. Penambahan tunjangan jelas akan semakin membebani anggaran negara. Terlebih, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran dan berencana menambah utang.

Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, target pembiayaan utang tahun depan Rp 781,9 triliun. Ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 749,2 triliun dan pinjaman senilai Rp 32,7 triliun. Rasio utang pemerintah diperkirakan 39,96 persen terhadap PDB.

Adapun postur RAPBN 2026 memproyeksikan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun dan

belanja Rp 3.786,5 triliun. Dengan demikian, defisit mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.

Penambahan tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan, lanjut Bernard, menjadi ironi di tengah efisiensi anggaran. Hal ini mengingat pendapatan yang diterima oleh setiap anggota DPR sudah sangat besar dan cukup, bahkan di atas rata-rata pendapatan masyarakat.

Keputusan untuk melanjutkan pemberian tunjangan tambahan itu akan menegaskan bahwa DPR telah kehilangan kepekaan terhadap situasi masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, publik juga akan mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut karena justru memperbesar beban APBN.

Apalagi, kinerja DPR dengan penghasilan yang sangat besar saat ini dinilai masih kurang optimal. Dalam kerja legislasi, misalnya, baru empat dari 47 rancangan undang-undang yang selesai dibahas. Kualitas legislasi pun sering dipertanyakan karena sebagian UU digugat ke Mahkamah Konsti-

tusi dan pembahasannya kerap diwarnai oleh penolakan publik.

"Fitra menilai bahwa DPR gagal menahan diri dan memberikan teladan dalam pengelolaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada privilese yang diterima oleh anggota DPR," ucapnya.

Dari Kemenkeu

Pada Kamis pekan lalu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, munculnya anggaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR berawal dari penghitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, anggota DPR saat ini sudah tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas yang berada di Kalibata, Jakarta. Kemenkeu kemudian berencana memberikan pengganti berupa tunjangan perumahan.

Terkait nilai tunjangan yang mencapai Rp 50 juta per bulan, pertimbangannya berupa lokasi dan fasilitas serupa yang diperoleh lembaga lain. "Salah satu pertimbangan nilai itu adalah juga dengan membanding-

kan dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Jakarta," kata Dasco.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun, juga menyampaiakan, DPR tidak menentukan besaran tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan. DPR hanya menerima besaran yang berasal dari penghitungan Kemenkeu. Nilai itu ditentukan sesuai standar dan klasifikasi untuk tunjangan perumahan bagi pejabat negara.

Menurut dia, tunjangan perumahan bagi anggota DPR masih dibutuhkan. Setelah tidak menempati rumah dinas, para anggota DPR yang rumahnya jauh dari Jakarta membutuhkan tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

"Banyak anggota DPR itu, kan, datang dari daerah. Aslinya mereka kalau bisa dicek KTP mereka, mereka ini, kan, orang daerah dan mereka harus mempunyai tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugas sebagai pejabat negara," kata Misbakhun.

(SYA/BOW)